

Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan)

Masri Ayu Ndruru¹, Eduar Baene²

^{1,2}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias, Indonesia
* Corresponding Author. E-mail: eduarbaene@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan yang dialami desa terkait pengelolaan dana desa dan memahami bersama lebih dalam tentang pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan sistem yang berkomputerisasi, pelaporan dana desa akan mampu dilakukan dengan cepat dan output laporan keuangannya juga akan lebih handal di banding dengan pelaporan secara manual. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dalam pendekatan deskriptif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan pengumpulan data serta dokumentasi yang digunakan untuk hasil penelitian. Dalam penelitian ini menemukan masalah utama yang perlu di analisis dalam pengelolaan dana desa yaitu masih belum memadainya sumber tenaga jaringan dan PLN yang menyebabkan berbagai macam hambatan dalam proses penelolan keuangan desa dan juga sumber daya manusia yang masih terbilang kurang dan tertinggal dari pada kota atau kabupaten. Akuntansi Desa merupakan pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa. Dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan serta pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan suatu informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan beberapa pihak yang berhubungan dengan desa.

Kata kunci: sistem akuntansi, pengelolaan, sistem keuangan desa, dana desa

Abstract

This study aims to identify problems experienced by villages related to managing village funds and to understand more deeply about managing village funds using a computerized system, village fund reporting will be able to be done quickly and the output of financial reports will also be more reliable than manual reporting. The research method used is qualitative in a descriptive approach using observation techniques, interviews and data collection and documentation used for research results. In this study found the main problem that needs to be analyzed in the management of village funds, namely that there are still inadequate sources of network power and PLN which cause various kinds of obstacles in the process of managing village finances and also human resources which are still lacking and lagging behind cities or regencies. Village Accounting is a record of transaction processes that occur in the village. Evidenced by notes, then recording and financial reporting is carried out so that it will produce information in the form of financial reports that are used by several parties related to the village.

Keywords: accounting system, management, village financial system, village funds

PENDAHULUAN


Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 pada tanggal 15 Januari 2014, ini menjadi berita yang sangat

membahagiakan bagi masyarakat desa di mana desa akan mendapatkan dana bantuan dari pemerintah, sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014, setiap Desa memiliki

Submitted
09-11-2022

Accepted
30-11-2022

Published
30-11-2022

 : <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i2.43>

pendapatan dari pemerintah sebagai pembangunan desa, sehingga setiap desa mendapat banyak uang dari pemerintah, dan fokusnya adalah mampu membuat lebih banyak perubahan bagi desa dan masyarakat dalam pembangunan. Agenda tersebut di dukung dengan keluarnya kebijakan baru pendanaan desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Permen, 2014)).

Menurut pasal 24 huruf g UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menerangkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berasaskan akuntabilitas adalah asas yang memastikan bahwa tiap aktivitas serta hasil akhir dari aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa wajib bisa dipertanggungjawabkan kepada warga desa (Permen, 2014). Peraturan diterbitkan agar dapat membuat pemerintahan desa melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan yang ditetapkan. Permendagri No 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang meliputi kegiatan perencanaan, penerapan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting dalam pengawasan pengelolaan keuangan dan kinerja kegiatan desa khususnya dana desa (Permendagri, 2014).

Pemerintah desa diharapkan sanggup meningkat dalam perihal pembangunan serta menambah pemanfaatan sumber daya yang ada supaya tiap desa tidak tertinggal di masa *modern* di saat ini (Fauziah, 2018). Oleh sebab itu, dalam pengelolaan anggaran dana desa, ada akibat yang besar baik kesalahan administratif ataupun kesalahan substantif. pelaporan, dan tanggungjawab keuangan. Ini tidak lumayan, anggaran yang diperoleh dari bermacam sumber anggaran provinsi serta kabupaten (APBN dan APBD) memiliki banyak resiko, sehingga pengelolaan dana desa wajib transparan, akuntabel serta tidak

disalahgunakan (Sari, Ghozali & Achmad, 2017; Telaumbanua, & Ziliwu, 2022).

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam pembangunan pedesaan yaitu anggaran pembangunan yang disediakan dalam Anggaran Pemasukan serta Belanja Desa (APBDes) guna pembangunan pedesaan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), yang dialokasikan dalam Kelompok Transfer Desa.

Dengan demikian masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana desa ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemerdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana desa sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana seharusnya. Hal ini, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aparat desa yang belum memiliki kompetensi dalam pengelolaan dana desa (Ismail, Widagdo & Widodo, 2016; Raharjo, 2020).

Pemerintah harus menjalankan Sistem Akuntansi bukan hanya sebagai sistem pengendali proses transaksi keuangan melainkan harus menjadi suatu pencapaian tujuan organisasi sebagaimana yang sudah ditetapkan dari tujuan suatu organisasi tersebut, dengan diterapkannya sistem akuntansi sangatlah berguna untuk mendukung pemerintahan baik daerah ataupun kota, sehingga pemerintahan desa mudah dalam melakukan pelaporan serta pertanggungjawaban kepada pemerintahan di kabupaten (Mulyadi, 2016; Murungi, & Kayigamba, 2015).

Berlandaskan perihal di atas pastinya muncul masalah yang menarik buat analisa yang berhubungan dengan sistem akuntansi yang pengelolaan dana desa yang berada pada Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan, Desa Lolozukhu ialah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan yang terdiri dari 2 Dusun, memperoleh dana desa dari

pemerintahan guna pembangunan Desa tersebut dengan nominal yang masih belum diketahui. Oleh karena itu dilaksanakan penelitian dengan mengamati sistem akuntansi desa dan pengelolaan dana desa pada desa Lolozukhu. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan yang dialami desa terkait pengelolaan dana desa dan memahami bersama lebih dalam tentang pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan sistem yang berkomputerisasi, pelaporan dana desa akan mampu dilakukan dengan cepat dan *output* laporan keuangannya juga akan lebih handal di banding dengan pelaporan secara manual.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kualitatif. Sampel pada penelitian ini adalah mewawancarai beberapa pekerja pada desa Lolozukhu, sampel yang di ambil adalah dengan mewawancarai kepala desa sebagai pemimpin desa, sekretaris desa, bendahara sebagai penanggungjawab keuangan dan salah satu masyarakat sebagai perwakilan dari beberapa masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang diunakan adalah teknik: 1). wawancara (*interview*), 2). dokumentasi, dan 3). observasi (*observation*), (Sugiyono, 2019:195-205).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Wawancara telah dilakukan dengan kepala desa, sekretaris desa, bendahara dan salah satu masyarakat di desa Lolozukhu yang menjadi lokasi penelitian. Dari hasil wawancara dan observasi awal kepada Kepala Desa Lolozukhu di temukan beberapa temuan. Di mana dilakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan tentang apakah sistem keuangan desa telah diterapkan dengan baik dan benar dan beberapa pertanyaan lainnya.

Menurut kepala pemerintahan desa Lolozukhu sudah menerapkan Sistem

Akuntansi Pengelolaan Dana Desa dalam bentuk Sistem Keuangan Desa yang telah di lakukan pada Tahun 2019 lalu, dan dilakukan prosesnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan telah menjalankan versi terbaru yang rilis pada tahun 2021. Ada beberapa kendala dalam proses komputerisasi sistem pengelolaan keuangan desa yaitu tidak mendukungnya jaringan *internet* pada desa dalam setiap pencatatan sehingga para aparat desa atau bendara harus melakukannya secara manual dengan *Microsoft Excel*, dan mencari signal untuk pengupdatetannya. Hal ini membuat kepala desa serta para aparat desa yang bekerja dalam bidang sistem keuangan desa komputeri merasa terhalangi dan harus lebih teliti dalam bertindak untuk pertanggungjawabannya.

Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) dari pemerintah digunakan pemerintahan desa yang bertujuan untuk memudahkan para pemerintah desa dalam pencatatan keuangan terutama kepada bendahara desa sebagai penanggungjawab dalam sistem pengelolaan keuangan desa yang mampu memberikan hasil yang baik sehingga dapat mempermudah para aparat desa dalam melakukan pertanggungjawabannya dan pelaporan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dalam wawancara kedua dengan Sekretaris Desa Lolozukhu, juga mewawancarai pendapat Sekretaris desa tentang bagaimana pengawasan dan keterbukaan para pemerintahan desa terhadap keuangan desa pada desa Lolozukhu. Sekretaris Desa Lolozukhu mengatakan bahwa ada beberapa kekurangan pengawasan pemerintah secara luas dalam pembangunan desa dan dalam hal itu pemerintah atas sudah memberikan cukup dana bagi masyarat tapi tidak mempertimbangkan apakah dana tersebut bisa dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur. Meskipun, digunakan sesuai dengan yang dianggarkan banyak kekurangan dalam pengelolaan

dana desa dan di posisi ini sangat dibutuhkan perhatian bagi pemerintah agar memberikan perhatian lebih pada masyarakat yang jauh dan terpelosok. Sehingga masih kurangnya kemajuan Desa pada perkembangan zaman saat ini karena dalam pelaksanaan proses pengelolaan keuangan desa saja masih harus butuh usaha yang maksimal. Dalam akuntabilitas Desa Lolozukhu sudah melaksanakan keterbukaan atau transparansi tentang laporan pengelolaan dana desa kepada masyarakat dengan mengadakan rapat mengundang masyarakat agar berpartisipasi dalam rapat tersebut dalam pelaporan keuangan desa Lolozukhu.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada bendahara desa Lolozukhu, tentang bagaimana bendahara menjalankan sistem akuntansi pengelolaan dana desa dalam sistem keuangan desa, bendahara mengatakan bahwa menggunakan sistem akuntansi pengelolaan dana desa ini sangat berperan penting pada tugas yang di kerjakannya, mempermudah proses pengimputan sehingga mengurangi kesalahan-kesalahan yang akan terjadi dalam pencatatan keuangan desa dan membuat bendahara dengan cepat memberikan hasil untuk dipertanggungjawabkan oleh aparat desa. Tetapi, di samping itu ada beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi oleh bendahara dalam pengimputan sistem keuangan desa yaitu dengan kurangnya jaringan *internet* yang kurang mendukung proses pengelolaan keuangan desa sehingga menyebabkan banyaknya keterlambatan dalam pengimputan dan harus menggunakan metode manual dengan *Ms. Exel* untuk mendukung agar tidak terjadi kesalahan fatal dalam pengimputan.

Wawancara terakhir dilakukan dengan salah satu masyarakat desa Lolozukhu dengan menanyakan bagaimana kepuasan masyarakat dengan transparansi yang dilakukan pemerintahan desa tentang laporan keuangan desa, nara sumber

mengatakan bahwa mereka cukup puas dengan sistem pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah dan mengarahkan dana desa tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakat masih bisa menikmati bantuan pemerintahan, walaupun begitu karena masih sebagai desa terpolosok membuat desa tetap tertinggal dalam berbagai hal baik kegiatan maupun sumber daya manusianya. Jika dalam pengelolaan tidak ada masalah dari para aparat hal yang sangat disesalkan kepada pemerintahan desa yaitu kurangnya ketelitian dalam pemilihan bahan baku dalam pembangunan desa sehingga belum lama menggunakan sudah mengalami kerusakan dan tetap tertinggal. harapan masyarakat kedepannya adalah semoga pemerintah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat desa pelosok atau tertinggal sehingga mereka bisa merasa nyaman dan dapat menerima bahwa pemerintah memiliki keadilan kepada masyarakat tanpa memandang bulu.

Dengan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa Desa Lolozukhu hampir bisa menerapkan sistem akuntansi melalui sistem keuangan dengan baik desa jika situasi dan kondisi mendukung, tetapi karna masih belum adanya jaringan *internet* yang baik untuk mendukung proses sistem akuntansi pengelolaan dana desa tersebut menjadi halangan yang sangat berpengaruh bagi para aparat dan bendahara desa. Sehingga proses pencatatan akuntansinya masih berbelit dan menggunakan metode manual atau *Microsoft Exel*.

Pemerintah masih belum melaksanakan pengawasan yang baik terhadap setiap desa tertinggal dan terpelosok, sehingga banyak kekurangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana desanya tentang akuntabilitas pada desa Lolozukhu sudah dilaksanakannya keterbukaan laporan keuangan dengan masyarakat. Banyak harapan masyarakat kepada pemerintahan tentang perubahan desa Lolozukhu tapi masyarakat hanya

berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat terpelosok dan tertinggal agar tetap berkembang dalam kemajuan zaman saat ini walaupun masih terbilang jauh dari Kabupaten/Kota.

Sistem Akuntansi Terkomputerisasi

Sistem Keuangan Desa yang berbasis aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sistem keuangan desa ini adalah aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagai alat atau sistem yang digunakan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, berupa Realisasi Anggaran dan APBDes.



Gambar 1. Halaman depan Sistem Keuangan Desa

Program aplikasi dana desa ini merupakan program yang berbasis *microsoft acces*. Sistem komputerisasi tersebut akan menghasilkan pengelolaan dan laporan sesuai dengan petunjuk yang ada di Permendagri 113/2014, dapat di lihat pada tabel 1, di bawah:

Tabel 1. Pengelolaan Dan Laporan Program Aplikasi Dana Desa

No	Program Aplikasi	
1	Laporan Anggaran	<p>Laporan Anggaran Detail Per Kegiatan. Laporan ini berisi anggaran yang di susun secara detail per kegiatan.</p> <p>Laporan Anggaran</p>

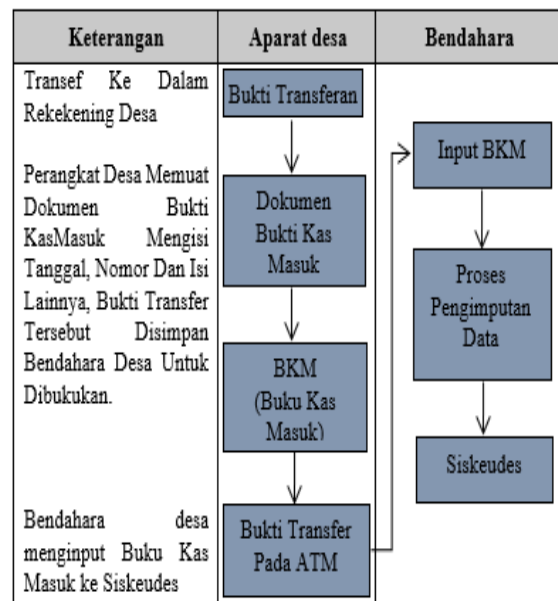
		<p>Detail Per Rekening Anggaran (Buku Besar). Laporan ini berisi anggaran yang di susun secara detail per rekening anggaran dengan merujuk pada kegiatan tertentu atau dapat dikatakan pula bahwa laporan ini adalah buku besar realisasi kegiatan.</p> <p>Laporan Realisasi Ringkas. Laporan ini berisi anggaran secara detail ringkas per rekening anggaran tanpa merujuk pada kegiatan tertentu di mana tiap mata anggaran yang sama.</p>
2	Laporan Realisasi	<p>Laporan Realisasi Detail Per Kegiatan. Laporan ini berisi realisasi yang di susun secara detail per kegiatan.</p> <p>Laporan Realisasi Detail per Rekening Anggaran (Buku Besar). Laporan ini berisi realisasi yang di susun secara detail per rekening anggaran dengan merujuk pada kegiatan tertentu atau dapat dikatakan pula bahwa laporan ini adalah buku besar realisasi kegiatan. Laporan Realisasi Ringkas:</p> <p>Laporan Realisasi Ringkas Detail. Laporan ini berisi realisasi yang</p>

		<p>dilawankan dengan anggaran yang ada yang disusun secara detail dengan merujuk pada kegiatan tertentu.</p> <p>Laporan Realisasi Ringkas Total. Laporan ini berisi realisasi yang dilawankan dengan anggaran yang ada yang di susun ringkas per rekening mata anggaran secara total.</p>
3	Formulir	<p>Formulir Anggaran. Formulir yang di susun sesuai dengan input anggaran per kegiatan. Dapat pula dijadikan sebagai formulir pendukung anggaran per kegiatan.</p> <p>Formulir Realisasi. Formulir yang di susun sesuai dengan input pelaksanaan kegiatan. Dapat pula dijadikan sebagai formulir pendukung bukti pelaksanaan kegiatan.</p>
4	Realisasi Periode Sebelumnya	<p>Setelah tutup buku sebuah anggaran, maka semua data akan dihilangkan dan hanya tersisa realisasi anggaran dari periode sebelumnya yang dapat di cetak dari sub laporan ini.</p>

Sistem akuntansi yang terkomputerisasi untuk melakukan pengelolaan dana desa sangat tepat mengingat juga dasar pendidikan kepala desa dan aparatnya bukan bidang akuntansi. Penyimpanan data pada pengelolaan

keuangan desa tidak membutuhkan banyak dokumen tetapi data akan tersimpan dan bisa digunakan dalam waktu yang lama. Selain komputer merupakan alat pengolah data yang tepat dengan akses ketelitian maupun kecepatan tinggi, sistem komputerisasi juga akan menghemat waktu dan bekerja dengan tingkat akurasi yang lebih dibandingkan dengan sistem manual. Dengan begini Kepala Desa dan para Aparat desa dapat melakukan pekerjaan dengan mudah dan teliti serta bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka dengan baik.

Tabel 2. Sistem Prosedur Penerimaan Transfer Ke Rekening Desa



Sistem prosedur penerimaan pendapatan pada Desa melalui transfer rekening desa. Melakukan transfer ke rekening kas desa kemudian perangkat desa membuat dokumen bukti Kas Masuk (BKM) mengisi tanggal dan nomor lain di bukti kas masuk, lalu di *input* bendahara desa ke dalam aplikasi SisKeuDes. Hasil dari Sistem prosedur ini menjadi tanggungjawab para aparat desa kepada pemerintah dan masyarakat nantinya.

Tabel 3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lolozukhu Tahun
 Anggaran 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
	4	PENDAPATAN		
	4.2	Pendapatan Transfer	851.579.671,00	
	5	JUMLAH PENDAPATAN	851.579.671,00	
1		BELANJA		
1.1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	370,464,671.00	
1.1.01		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan.	307,964,671,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42,000,000.00	
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	42,000,000.00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	107,400,000.00	
1.1.04	5.1	Belanja Pegawai	107,400,000,00	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian	106,164.671.00	
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	106,164,671,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	38,400,000.00	
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	38,400,000.00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam	14,000,000,00	
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14,000,000,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	11.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran atau Pemerintahan	11.500,000,00	
1.2.01	5.3	Belanja Modal	11,500,000,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5,000,000,00	
1.3.02		Penyusunan atau Pendataan atau Pemutakhiran Profil Desa (Di Pilih)	5,000.000.00	
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000.000,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	46,000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	30,000.000,00	
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30,000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa atau RKPDesa dll)	6.000.000,00	
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa(APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8,000,000,0	
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8,000,000,0	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.000,000.0	
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2000 000.00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	111,175,000.00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10,600.000.00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE,	10,800,000.00	

Masri Ayu Ndruru, Eduar Baene

		Sarana PAUO dst)		
2.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10,800,000.00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	17.400,000.00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa atau Polindes Miik Desa (obat, Insentit, KB. dsb)	11,400 000.00	
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11,400 000.00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentit)	6 000 000.00	
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6 000 000.00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	82,975,000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan atau Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal	82,975,000.00	
2.6.03	5.3	Desa Belanja Modal	82,975,000.00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	50,600,000.00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15,600,000,00	
3.1.02		Penguatan& Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan atau Ketertiban oleh pemdes	15,600,000.00	
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15,600,000.00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6,000,000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat atau Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6,000,000.00	
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000.00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10,000.000.00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna atau Klub Kepemudaan atau Olahraga Tingkat Desa	10,000,000.00	
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19,000,000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	4,000.000.00	
3.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000.00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3,000,000.00	
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3,000.000.00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12,000,000.00	
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000,00	
3.4.03	5.3	Belanja Modal	6,000.000.00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	122,000,000.00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	72.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	72,000,000,00	
4.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	72,000,000.00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	50.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	35,000,000.00	
4.3.01	5.2	Betanja Barang dan Jasa	35000 000.00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	15 000000.00	
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000 000.00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	197,340,000.00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	46,140,000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	46,140,000.00	
5.2.00	5.4	Betanja Tidak Terduga	46,140,000.00	

5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	151,200,000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	151,200,000.00	
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	151,200,000.00	
		JUMLAH BELANJA	851.579.671,00	
		SURPLUS (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH ANGGARAN DESA	0,00	

Kendala Yang Dialami Pemerintah Desa Dalam Proses Pengelolaan Sistem Keuangan Desa

Ada beberapa kendala yang dialami oleh pemerintahan desa dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa, diantaranya yaitu:

1. Jaringan Listrik PLN dan Jaringan Internet

Jaringan listrik PLN di desa Lolozukhu sudah cukup memadai meskipun masih belum dikatakan baik, tetapi sudah bisa memberikan penerangan bagi masyarakat walaupun harus sering padam dan menunggu lama untuk aktif kembali.

Jaringan *internet* menjadi kendala yang sangat berpengaruh bagi pemerintahan desa terlebih desa terpencil, seperti pada desa Lolozukhu yang menjadi hambatan besar bagi para pemerintahan desa yaitu jaringan *internet*, karena letak desa yang terpencil menghambat koordinasi dan pengawasan terkait pengelolalan keuangan desa, termasuk karena kendala transportasi dan komunikasi yang sangat kurang memprihatinkan.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia aparatur desa yang kurang memadai menjadi kendala dalam implementasi aplikasi siskeudes. Sehingga menyebabkan lemahnya pengelolaan yang baik dan benar dan masyarakat masih tertinggal.

Analisa Hasil Penelitian

Menganalisa artinya memberikan penilaian atau pemecahan suatu permasalahan yang dihadapi. Untuk menganalisa bagaimana Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias

Selatan, hasil penelitian di lapangan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan teori-teori yang mendukung penelitian.

Dari uraian di atas dan dukungan teori tentang sistem akuntansi, beserta hasil penelitian di lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. maka, hasil analisa wawancara kepada kepala desa, menganalisa sistem akuntansi pengelolaan dana desa di Desa Lolozukhu, telah sesuai dengan peraturan pemerintah dan dilaksanakan sebagaimana semestinya, tetapi karna beberapa kendala yang mengakibatkan terjadi kendala-kendala yang sedikit fatal dalam proses pengelolaan keuangan desa. analisis wawancara sekretaris yaitu masih kurangnya kepedulian pemerintah teratas kepada desa pelosok atau tertinggal. Analisis wawancara bendahara bendahara menjadi pemeran utama dalam keuangan desa dan sistem pengelolaan dana desa merupakan hal yang penting untuk diteliti dalam hasil wawancara bendahara merasa terkendala dalam proses pengelolaan dana desa karna belum mendukungnya sumber daya alam dan manusia. Pada wawacara terakhir dengan masyarakat, penduduk desa Lolozukhu hanya berharap pemerintah dapat memperhatikan desa yang tertinggal dan terpelosok.

Dalam penelitian ini menemukan masalah utama yang perlu di analisis dalam pengelolaan dana desa yaitu masih belum memadainya sumber tenaga jaringan dan PLN yang menyebabkan berbagai macam hambatan dalam penelolan keuangan desa dan juga sumber daya manusia yang masih terbilang kurang dan tertinggal dari pada kota atau kabupaten.

Memberikan analisis tentang gambaran pengelolaan dana desa, program aplikasi dana desa, prosedur dana desa serta laporan belanja desa sebagai hasil dari

penelitian. Analisis yang dilakukan adalah hasil dari kesimpulan dari cara pandang tentang hasil pembahasan dan hasil penelitian yang didapatkan, yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat kedepannya.

Setelah diuraikan sistem akuntansi secara umum adalah formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan suatu organisasi.

Perihal di atas sependapat dengan penelitian Martini et al. (2019), di mana pada hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Pengendalian dilaksanakan dengan berpedoman kepada SPIP. SPIP berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi pemerintahan dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif.

Sistem akuntansi merupakan sistem yang di buat manusia di mana terdiri atas komponen komputer ataupun komponen manual yang terkombinasi guna melaksanakan pengumpulan data, penyimpanan data, serta manajemen informasi untuk menciptakan data akuntansi bagi pengguna informasi akuntansi. Sistem akuntansi sangat diperlukan dalam beberapa organisasi atau perusahaan agar mendapatkan informasi untuk mencapai suatu tujuan perusahaan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan sistem akuntansi yang telah dikemukakan di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa tujuan sistem akuntansi untuk menyediakan informasi

bagi perusahaan sehingga dapat memperbaiki sistem yang sudah ada sesuai dengan sistem pengendalian *intern* yang baik.

Akuntansi Desa merupakan pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa. Dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan serta pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan suatu informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan beberapa pihak yang berhubungan dengan desa.

Kesimpulan, wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan melakukan pertanyaan kepada sumber informasi, yang dapat juga dilakukan dengan terstruktur yaitu teknik pengumpulan data, apabila telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang diteliti, dan tidak terstruktur adalah wawancara bebas di mana tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara teratur dan lengkap, melainkan menggunakan garis besar permasalahan yang ditanyakan.

Memberikan analisis tentang gambaran pengelolaan dana desa, program aplikasi dana desa, prosedur dana desa serta laporan belanja desa sebagai hasil dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal Of Islami Finance And Accounting*, 3(1), 75-84.
- Fauziah, I. (2018). SAP: Standar Akuntansi Pemerintahan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (1), 146-154.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi

- Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 323-340.
- Martini, M., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106-123.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi Edisi 4*. Selemba Empat: Jakarta Selatan.
- Murungi, S., & Kayigamba, C. (2015). The Impact of Computerized Accounting System on Financial Reporting in the Ministry of Local Government of Rwanda. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS)*, 6(4), 261-266.
- Permen. (2014). Permerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Permendagri. (2014). Permen No 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sari, N., Ghozali, I. & Achmad, T. (2017). The Effect Of Internal Audit And Internal Control System On Public Accountability: The Empirical Study In Indonesia Stae Universi-ties. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8(9), 157-166.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Edisi 2*. Bandung: Alfabeta.
- Telaumbanua, A., & Ziliwu, N. (2022). Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 108–123.
<https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.21>